

BAB II

DINAMIKA SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Kalimantan Timur berada di wilayah dengan koordinat antara 4°24' LU - 2°25' LS dan 113°44' - 119°00' BT dan memiliki luas wilayah 127.267,52 km². Secara administratif, Kalimantan Timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada sebelah utara, kemudian berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia pada sebelah barat, lalu juga berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada sebelah selatan, serta berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi pada bagian timurnya. Dengan wilayah yang luas, bentangan alam yang luas juga dimiliki oleh Kalimantan Timur dan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur untuk memiliki peluang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 potensi dumber daya lahan di Kalimantan Timur yaitu seluas 12.638.931 Ha (75,54%) dari total luas wilayah Kalimantan Timur. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalmantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu. Selain itu, Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) administrasi kota, yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ibukota provinsi dari Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda.¹⁸

¹⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, *Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)*

Tabel 2.1. Tabel Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.92	16	194
3. Mahakam Ulu	1.994.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	135
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.032

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam. Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, Malaysia di sebelah Barat. Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Jumlah danau di provinsi ini juga cukup banyak yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 Ha dan 11.000 Ha.

A. Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur

Dikenal dengan penghasil tambang dan kayu yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia, berikut akan dijelaskan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang menjadi fokus dari kondisi suatu daerah. Indikator-indikator yang akan dijelaskan adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur dan laju inflasi ekonomi Kalimantan Timur. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi

berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.¹⁹

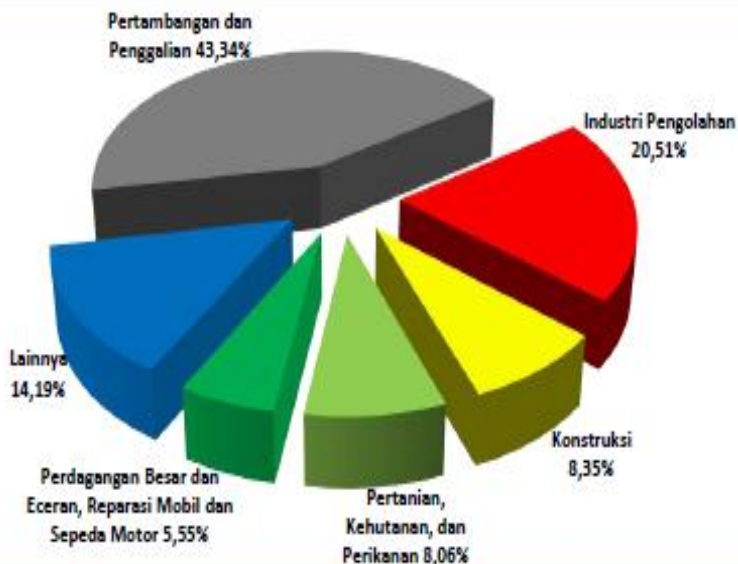
1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna kepentingan evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami peningkatan di setiap periodenya meskipun peningkatannya semakin lama terlihat semakin melambat hingga akhirnya secara umum menurun pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dengan besaran 507,07 trilyun rupiah, dibanding dengan tahun 2015 mencapai 503,69 trilyun rupiah. Dominasi PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor yang terkait dengan batubara dan migas sehingga jika dominasi sektor sumber daya tak terbaharui tersebut dihilangkan maka PDRB Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 241,69 trilyun rupiah. Meskipun pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Timur tumbuh negatif, yang ditandai dengan penurunan drastis nilai PDRB migas, akan

¹⁹ Ibid., hal. II-6

tetapi nilai PDRB non migas dan batubara terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.1. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (persen)

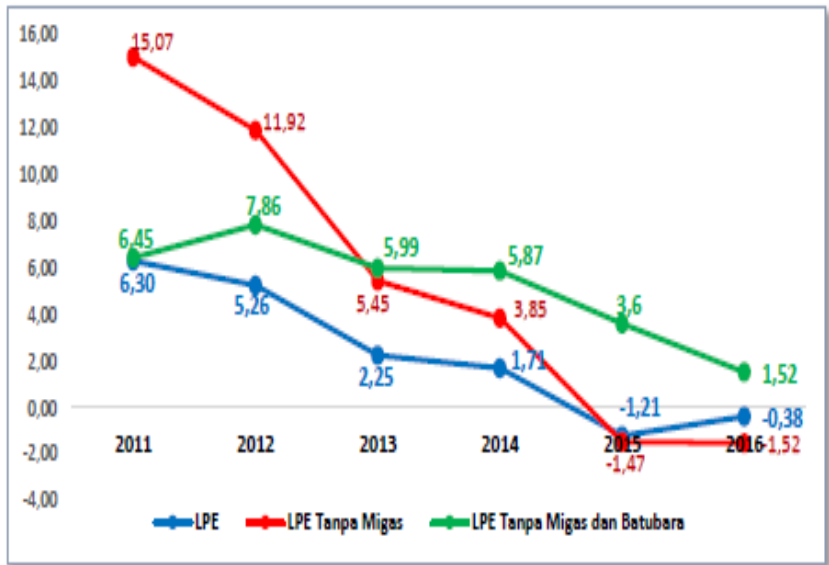
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Pembentukan perekonomian daerah didominasi oleh kelompok pertambangan dan penggalian yang mencapai 43,34 persen. Meskipun demikian, dominasi struktur ekonomi kategori pertambangan dan penggalian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sebagaimana bisa dilihat dari kontribusi sektor dan pertumbuhan sektoralnya yang mengalami perlambatan, bahkan pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Tingginya dominasi sumber daya alam tak terbarukan terhadap pembentukan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ini

akan menimbulkan gejala perekonomian di kemudian hari jika tidak dibarengi dengan pengelolaan perekonomian pembangunan secara berkelanjutan. Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur adalah meskipun pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kontribusi PDRB Nasional. Namun yang perlu digarisbawahi adalah produksi minyak, gas, dan batubara terus menurun dari tahun ke tahun yang menyebabkan nilai tambahnya menurun sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun, meskipun PDRB masih tergolong tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -1,21 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,71 persen. Perlambatan ini sebagian besar dikarenakan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam struktur perekonomian daerah, yaitu kategori pertambangan dan penggalian (-3,52%). Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi jika dikeluarkan sektor yang terkait batubara dan migasnya mencapai 3,60 persen. Pada tahun 2016, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh negatif sebesar -0,38 persen sebagai akibat dari penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 43,34 persen, jauh di bawah pertumbuhan tahun 2015 sebesar 45,16 persen. Jika dilihat berdasarkan kategorinya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kategori pengadaan listrik dan gas (21,24%) serta jasa pendidikan (12,23%).²⁰

²⁰ Ibid., hal. II-6 - II-9



Gambar 2.2. . Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016 (persen)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

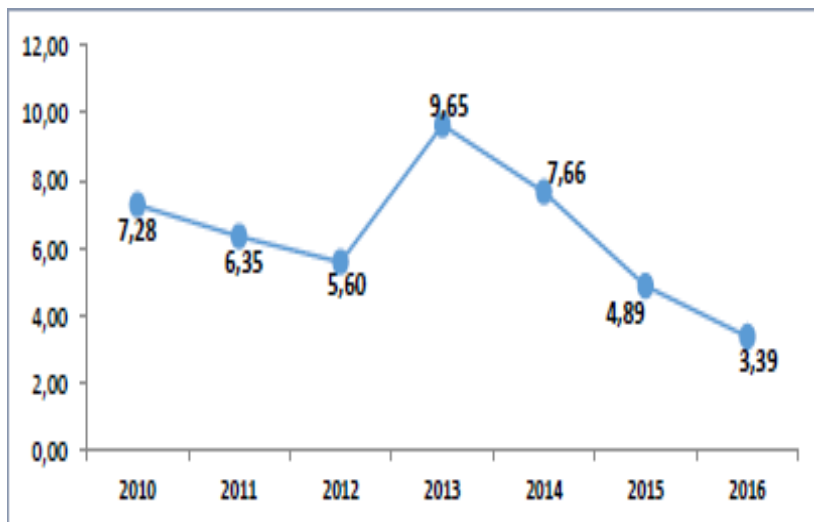
2. Laju Inflasi

Inflasi, dalam ilmu ekonomi, merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (continue). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2016 (3,39%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional. Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.²¹

²¹ Ibid., hal. II-10 – II-11



Gambar 2.3. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen).

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

3. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah

untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.²²

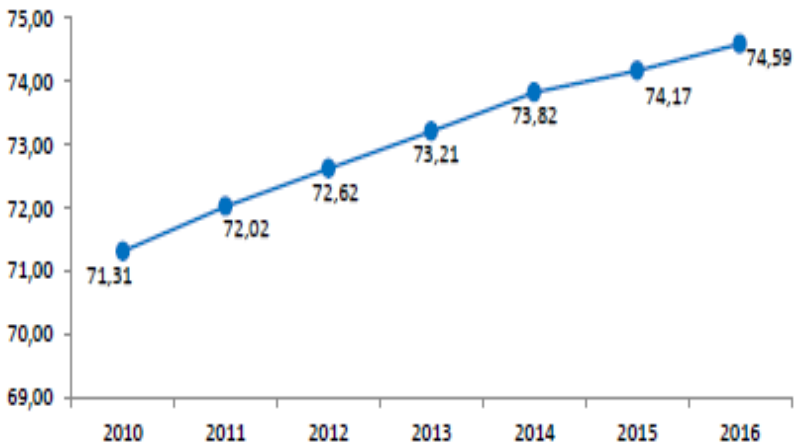
a. Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kekayaan suatu negara yang dijadikan sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat membuat masyarakat menikmati hidup sehat, panjang umur dan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Pendekatan pembangunan manusia telah menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dikembangkan pertama kali oleh Amartya Sen, pemenang nobel India dan ekonom Pakistan, yang dibantu oleh Lord Desai dari London School of Economics dan Gustav Ranis dari Yale University. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang

²² Ibid., hal. II-16

diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).



Gambar 2.4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 74,59 pada tahun 2016.

Selama periode 2010 hingga 2016 IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status. Walaupun pembangunan manusia di tahun 2016 berhasil mengalami percepatan, jika diamati sepanjang periode 2011-2015, terdapat kecenderungan perlambatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, wilayah dengan IPM tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan dengan IPM tertinggi adalah di Kota Bontang yang mencapai 78,92, diikuti oleh Kota Samarinda dengan IPM 78,91, dan Kota Balikpapan ditempat ketiga. Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 73,05 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 65,51.²³

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

²³ Ibid., hal. II-16 – II-17

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir (2016) mencapai 9,24 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Di tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,35 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.²⁴

c. Kesehatan

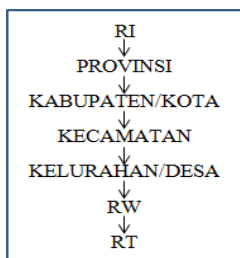
Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun

²⁴ Ibid., hal. II-18 – II-19

pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun. Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 mencapai 73,65 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 73,68 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2016 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.²⁵

B. Kondisi Politik Kalimantan Timur

Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi yang luas wilayah dan cakupannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Wilayah administrasi di Indonesia terbagi menjadi Provinsi yang membawahi Kabupaten/Kota kemudian membawahi Kecamatan, lalu membawahi lagi Kelurahan/Desa, lalu RW, dan yang terakhir adalah RT. Struktur dibawah RT seperti Kepala Keluarga bukan lagi merupakan struktur administrasi pemerintahan melainkan struktur sosial.



Gambar 2.5. Struktur Administrasi Pemerintah

²⁵ Loc. Cit.

1. Birokrasi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang bernama Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy pada periode pertama ia memimpin tahun 2008 hingga tahun 2013 kemudian Awang Faroek Ishak yang berpasangan dengan Mukmin Faisyal pada periode tahun 2013 hingga sekarang.²⁶

Dalam struktur organisasi modern, Provinsi Kalimantan Timur lahir ketika daerah ini ditetapkan sebagai *onder afdeling* atau bagian Kresidenan Kalimantan yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama resmi kresidenannya dalam bahasa Belanda adalah *Oosterafdeling van Residentie Zuid en oost Borneo*. Namun untuk mempermudah administrasinya, maka dibagi menjadi dua yaitu *onder afdeling* Samarinda yang meliputi daerah Kutai Timur, Balikpapan, Kutai Barat, Pasir, dan Boven Mahakam dan *onder afdeling Bulungan en Berau* yang meliputi Tarakan, Tidung, Apau Kayan, Bulungan, dan Berau. Masing-masing *onder afdeling* dipimpin oleh asisten residen namun khusus Samarinda dan Long Iran diperintah langsung oleh pemerintah pusat Hindia Belanda karena posisinya yang strategis. Kemudian pada tahun 1903 terbitlah Undang-Undang Desentralisasi yang bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan tradisional dengan sistem modern Hindia Belanda.

Seiring dengan hal tersebut, di Belanda juga berkembang pemikiran yang terkenal dengan sebutan “Politik Etis” yaitu semacam kesadaran di kalangan tertentu, terutama

²⁶ Amirullah, *KPU Tetapkan Awang-Mukmin Pemenang Pilgub Kaltim*, 18 September 2013 17:02 WIB, <https://kaltim.antaranews.com/berita/16647/kpu-tetapkan-awang-mukmin-pemenang-pilgub-kaltim>, diakses pada 10 Januari 2018 14.00 WITA

pihak oposisi pemerintah, yang mengingatkan pemerintah Belanda akan pentingnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan negara jajahan yang selama ini ditempatinya. Pemikiran ini terus berkembang hingga abad ke-19 dan pada tahun 1938 status Kalimantan diubah menjadi Gouvernement Borneo yang beribukota di Banjarmasin. Perubahan status ini membuat kedudukan Kalimantan Timur sebagai wilayah administratif semakin kuat. Hal ini terus berlanjut hingga jama penjajahan Jepang. Pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kalimantan Timur masih berstatus kresidenan dari Provinsi Kalimantan. Kemudian pada tahun 1956 Kalimantan dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sehingga Kalimantan Timur dinyatakan resmi sebagai provinsi pada tahun 1957.²⁷

Pada era modern seperti saat ini, dari posisi Kalimantan Timur hal ini berkaitan dengan otonomi daerah. Visi, misi dan 10 Agenda Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur ditetapkan karena itulah kondisi realistis dan keinginan dari masyarakat Kalimantan Timur. Namun pada masa Orde Baru, pembangunan memusat di satu titik yaitu Jakarta padahal tidak seharusnya sistem pemerintahan itu memakai pola sentralistik karena tidak ada yang mengetahui permasalahan di suatu daerah secara persis kecuali daerah itu sendiri. Sehingga pada masa reformasi terjadi, bangsa Indonesia sepakat untuk meninggalkan pola sentralistik dan menggantinya menjadi pola desentralisasi yang kemudian melahirkan apa yang disebut otonomi daerah.²⁸ Setelah menerapkan otonomi daerah, gubernur tidak lagi menjadi bawahan presiden yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Setiap daerah berhak mengatur daerahnya sendiri sehingga gubernur menjadi jabatan tertinggi di daerah dan

²⁷ Djahar Muzakir, *Mengenal Kalimantan Timur Lebih Dekat*, (Jakarta: CV Spirit Grafindo Samarinda), 2010, hal. 31.

²⁸ *Ibid.*, hal. 41.

berhak mengatur wilayahnya secara mandiri karena gubernur dipilih langsung oleh masyarakat daerahnya.²⁹ Walaupun presiden adalah jabatan tertinggi di negara, namun jabatan gubernur adalah jabatan politik dimana gubernur sendiri dipilih oleh masyarakat daerahnya sehingga yang membedakan presiden dan gubernur adalah levelnya saja. Namun, gubernur tetap menjalin hubungan dengan presiden berupa koordinasi, konsultasi, dan tugas pembantuan.³⁰

Syarat untuk menjadi gubernur adalah berusia minimal 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani hukuman, berpendidikan cukup, punya visi dan misi yang tepat dan relevan untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur, dan mendapat dukungan rakyat. Setelah syarat-syarat ini, calon gubernur dan wakil gubernur dapat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan ia harus mendapatkan dukungan dari partai politik.³¹ Calon gubernur dan wakil gubernur harus mendapat dukungan dari partai politik karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem demokrasi yang juga bagian dari perwujudan Trias Politika. Trias Politika adalah salah satu sistem politik yang membagi-bagi kekuasaan agar tidak tertumpuk di suatu tangan. Trias Politika membagi sistem menjadi tiga yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.³² Ketiganya punya peran masing-masing dan harus bekerja sama. Gubernur adalah eksekutif yang bertugas menjalankan pembangunan sebagaimana diamanatkan rakyat. Sedangkan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tugas utamanya ada tiga, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Cara kerjanya adalah misalnya, telah direncanakan tahun ini membangun jembatan dan uangnya sudah ada, DPRD mengawasi apakah amanat itu dikerjakan atau tidak. Kalau tak dikerjakan, maka

²⁹ Ibid., hal. 42.

³⁰ Ibid., hal. 43

³¹ Loc.Cit.

³² Ibid., hal. 48

diingatkan. Jika pembangunan jembatan tidak dikerjakan tapi uangnya habis tanpa diketahui alasan yang jelas, hal ini akan jadi masalah dan gubernur bisa diseret ke pengadilan. Sedangkan yudikatif adalah lembaga pengadil, yaitu Pengadilan Negeri. Di dalamnya ada hakim, jaksa, panitera, dan sebagainya. Tugasnya menjaga dan menegakkan Undang-Undang dan keadilan. Kalau ada yang mencuri, seharusnya diberi hukuman. Dan dalam bekerja, yudikatif selalu bersama-sama dengan kepolisian. Polisi adalah bagian dari eksekutif. Saling mengawasi diantara badan-badan tersebut terjadi agar kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan.³³ Jika semua fungsi ada di tangan eksekutif, misalnya, itu bisa menjadi otoriter. Inilah mengapa penting bagi gubernur dan wakil gubernur untuk memiliki dukungan dari partai politik yang sebagian anggotanya duduk di DPRD. Selain harus membina hubungan yang baik dengan yudikatif dan legislatif, gubernur juga harus bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Daerah Militer (Pangdam), dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati). Ikatan bersama ini disebut dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Kerjasama dengan Muspida ini bertujuan agar semakin banyak pengawasan yang terjadi dan membantu gubernur dalam bekerja.³⁴

2. APBD Provinsi Kalimantan Timur

Setiap tahun, gubernur diharuskan menyusun rencana kerja dengan kriteria rencana kerja berisi apa yang hendak dibangun, tujuan, dan biaya dari rancangan kerja tersebut. Biaya yang untuk seluruh rancangan kerja ditulis dan diserahkan kepada DPRD untuk diminta persetujuan. Setelah adanya persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi dana yang digunakan untuk rancangan kerja disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tugas gubernur untuk

³³ Ibid., hal. 49.

³⁴ Ibid., hal 53.

melaksanakan segala yang tertulis dalam APBD tersebut. Sumber dana yang didapatkan datang dari pendapatan yang diperoleh provinsi dari daerahnya, seperti dari keuntungan perusahaan milik pemerintah daerah, PDAM, bank daerah, PBB, selain itu juga dari Pemerintah Pusat yaitu dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU).³⁵

Tahun anggaran APBD selama 1 tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan yaitu dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain. Selain itu, terdapat Bagian Dana Perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi. APBD juga memiliki bagian yang mengatur dana untuk digunakan dalam keperluan penyeenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Dalam bagian yang terakhir, APBD Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.³⁶

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Perda (peraturan daerah) adalah perundang-undangan yang ditetapkan kepala daerah bersama DPRD. Peraturan ini berlaku di wilayah daerah tersebut. Jadi, ketika Pemerintah Prov (Pemprov) Kalimantan Timur mengeluarkan perda, maka perda ini hanya berlaku di wilayah Kalimantan Timur saja. Perda merupakan penjabaran perundang-undangan lebih tinggi, artinya dia tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga harus memperhatikan

³⁵ Ibid., hal. 55.

³⁶ Ibid., hal. 56-57

kondisi sosial budaya masyarakatnya, ini semua artinya dengan perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan rancangan perda.

Suatu pemerintahan tidak bisa sepenuhnya memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan tidak berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankan. draf rancangan perda diperbaiki secara terus menerus sehingga perda menjadi tidak efektif. Yang terpenting dalam proses itu adalah memenuhi ketentuan dasar tadi lalu kepentingan dan relevansinya bagi rakyat. Setelah pemerintahan menentukan suatu kebijakan, jika ada pihak yang merasa kurang pas atau keberatan maka dipersilahkan untuk memberi usulan, penolakan atau pengayaan. Dengan segala usulan dan pertimbangan dari pemerintah secara matang, kemudian perda siap untuk dijalankan. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan tersebut. Berbagai cara untuk mensosialisasikan perda tersebut adalah dengan menempelkan perda tersebut di tempat-tempat tertentu yang dapat dilihat masyarakat seperti dipajang dalam bentuk spanduk dan dipampang di jalan raya, kemudian cara lain adalah dengan sosialisasi oleh pejabat melalui media massa. Jika setelah sosialisasi terdapat penentangan terhadap perda atau kesalahan dalam perda tersebut maka perda tersebut akan ditahan atau bahkan direvisi lagi dengan proses yang sama. Gubernur tidak akan menggulirkan sebuah perda dengan tidak teliti, karena gubernur akan menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Jadi ada payung hukum bagi yang mengatur penetapan serta pelaksanaan perda. Ini juga bagian penting dari proses kehati-hatian menggulirkan perda. Kebutuhan masyarakat akan suatu perda tidak datang secara

serentak, maka perda dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.³⁷

Perda sangat penting karena merupakan bagian dari apa yang dinamakan kebijakan publik. Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandate dari publik atau orang banyak. Umumnya mereka ini memperoleh mandate melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Sekarang, kebijakan publik di negara kita lebih difokuskan pada pelayanan publik, yang mencakup segala sesuatu yang dapat dilakukan negara atau pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Pelayanan publik juga untuk menyeimbangkan peran pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Di sisi lain juga untuk menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta untuk mencapai amanat konstitusi atau perundang-undangan yang ada dan berkedudukan lebih tinggi. Misalnya Pemprov Kalimantan Timur membangun jalan yang menghubungkan antarkota atau kabupaten. Pembangunan jalan itu merupakan kewajiban Pemprov untuk kelancaran mobilitas penduduk. Tapi ternyata jalan tersebut digunakan untuk tujuan yang bukan-bukan, karena masyarakat juga tak turut merawatnya.³⁸

Yang harus dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Timur adalah dengan memiliki hak menarik keuntungan dari

³⁷ Ibid., hal. 103

³⁸ Ibid., hal. 105.

menarik pajak dan retribusi bias jadi memalukan bila kepentingan rakyat banyak tak diperhatikan, dengan kata lain jadi memalukan bila pelayanan publiknya buruk. Maka, keluarlah misalnya perda yang mengatur penggunaan jalan. Lalu, sebagai pelengkap, dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internak dalam birokrasi Pemprov Kalimantan Timur. Agar payung hukum dan bagaimana melaksanakan atau menerapkan perda itu jelas. Jadi, kalau langkah penertiban dilakukan, alasan-alasannya tak melanggar hukum. Karena itulah, perda tersebut sebagai perangkat hukum sebenarnya turut mendorong agar kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik berjalana efektif maka artinya perda melindungi realisasi dari amanat kita semua.

Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi berbagai aturan hukum. Bukan hanya hukum yang besar-besar yang bisa mengakibatkan kita masuk penjara, tapi aturan-aturan hukum yang kita anggap kecil pun harus dipatuhi. misalnya, jangan berjualan disembarang tempat, jangan membangun rumah di bantaran sungai, jangan pasang papan iklan sembarangan, dan sebagainya. Semua peraturan diciptakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jika merasa hal-hal tersebut terpaksa dilakukan dengan karena sarana-prasarana yang sesuai dengan kemampuan kita belum ada, ajukan itu kepada Pemprov Kalimantan Timur. Bisa juga menyampaikan kepada DPRD. Karena DPRD bekerja untuk rakyat, maka sudah menjadi kewajiban kita pula turut menjaga dan mengawasi agar realisasi segala keinginan kita berjalan lancar.³⁹

³⁹ Ibid., hal. 107